



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terutama untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil kegiatan evaluasi SAKIP berupa penyederhanaan kegiatan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74);
17. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sistematika penyusunan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
 - c. BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
 - f. BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempurnakan sebagai berikut :
 - a. Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - b. Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - c. Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - d. Penyempurnaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - e. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - f. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - g. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - h. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - i. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
 - j. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;

- k. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- l. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- m. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- n. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- o. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- p. Penyempurnaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- q. Penyempurnaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- r. Penyempurnaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- s. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- t. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- u. Penyempurnaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah “Mardi Waluyo” Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- v. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- w. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- x. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja PTSP Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- y. Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- z. Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- aa. Penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;

- bb. Penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2016 – 2021; dan
 - cc. Penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.
- (3). Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 26 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

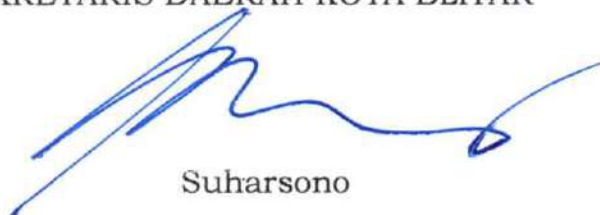


SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 26 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Suharsono

PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Blitar merupakan daerah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengembantugas menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2).

Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam tataran teknis operasional penyusunan renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan /atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
3. Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan renja.

Dalam menyikapi pelaksanaan dan perkembangan yang ada, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 perlu diadakan review dan revisi supaya lebih SMART. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi review dan revisi adalah :

1. Adanya penyederhanaan nama dan nomenklatur kegiatan dalam RKPD tahun 2019 – 2021 ;
2. Adanya perubahan sasaran dan indikator hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Blitar beserta OPD-nya.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286) ;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126) ;
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) ;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15) ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 78);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Blitar 2016 - 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana strategis Sekretariat Daerah untuk menjabarkan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar serta sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah serta pihak – pihak yang berkepentingan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar antara lain :

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah agar selaras dengan visi dan misi serta program prioritas yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

2. Menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan tingkat kemampuan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menggali kekurangan, potensi dan kemungkinan prospek pengembangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.
4. Menjamin keberlanjutan program yang telah dicapai sampai dengan tahun 2015. Artinya, apa yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2015 harus terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya serta menghindari terjadinya kemandekan (*stagnasi*). Demi terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi yang harmonis antara OPD dan penerapan regulasi kebijakan Kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan Penulisan dilakukan dengan menggunakan susunan Bab yang meliputi 7 (tujuh) Bab, dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I.** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
- BAB II.** Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III.** Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

- BAB VI.** Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VIII.** Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Blitar, dimana pembentukan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf (*Staffing Unit*) Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang sekaligus merupakan pejabat struktural tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar.

Sekretaris Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi:
 - i. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - ii. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan;
 - iii. Sub Bagian Tata Laksana dan Kinerja.
 - b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - i. Sub Bagian Perekonomian;
 - ii. Sub Bagian Mental Spiritual;
 - iii. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Sosial.
 - c. Bagian Hukum dan Organisasi membawahi:
 - i. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - ii. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi;
 - iii. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kelembagaan.
3. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Bagian Umum membawahi:
 - i. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - ii. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset;
 - iii. Sub Bagian Keuangan
 - b. Bagian Humas dan Protokol membawahi:
 - i. Sub Bagian Humas;
 - ii. Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan membawahi:
 - i. Sub Bagian Program dan Administrasi Pembangunan;
 - ii. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - iii. Sub Bagian Layanan Pengadaan.

Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengendalikan sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian tata pemerintahan, hukum dan organisasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama. Sedangkan fungsi yang melekat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada bagian tata pemerintahan, hukum dan organisasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pengoordinasian pembinaan dan pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu:

- a. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama antar daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama;
- 3) Penyusunan kebijakan, dan petunjuk teknis pendayagunaan, pembinaan kinerja aparatur;
- 4) Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis sertafasilitasi peningkatan pelayanan publik ;
- 5) Penyusunan kebijakan dan fasilitasi pembinaan ketatalaksanaan;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama;
- 8) Pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja;

- 9) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja dan pelaporan;
 - 10) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan produk hukum daerah, mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum kedinasan, sosialisasi, penyuluhan hukum dan mendokumentasikan produk - produk hukum daerah dan produk hukum lainnya, mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta menyiapkan perumusan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang hukum dan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas penyusunan produk hukum daerah, publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan dibidang hukum dan kelembagaan ;
- 4) Penyusunan materi rancangan peraturan perundang – undangan daerah;
- 5) Pengkajian dan evaluasi peraturan perundang – undangan daerah;
- 6) Pemberian bantuan hukum kedinasan;
- 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan penyuluhan hukum;
- 8) Inventarisasi, dokumentasi dan distribusi peraturan perundangan –undangan daerah dan peraturan lainnya;
- 9) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- 10) Pelaksanaan evaluasi dan perumusan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah;
- 11) Penyusunan kebijakan dan fasilitasi penataan lembaga perangkat daerah ;
- 12) Pengolahan, penyusunan dan pelaksanaan analisis dan standarisasi jabatan;
- 13) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama;
- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama;

- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan kesehatan kebudayaan dan social;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama;
- 5) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan badan usaha milik daerah dan perbankan daerah;
- 6) Pengumpulan, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 7) Pengoordinasian perumusan pedoman pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah;
- 8) Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program serta petunjuk teknis pembinaan, pemantauan perkembangan sarana perekonomian daerah;
- 9) Pemantauan dan analisis pemanfaatan dana daerah yang digulirkan kepada masyarakat;
- 10) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- 11) Pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sosial;
- 12) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada sub bagian pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan kesehatan kebudayaan dan sosial serta pelaporan;
- 13) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengendalikan sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pembangunan dan Layanan Pengadaan serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah. Sedangkan fungsi yang melekat pada Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan antara lain:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- d. Pengoordinasian pembinaan dan pelayanan administratif di bidang Administrasi Umum dan Pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan dibantu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu:

a. Bagian Umum

Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan dan sekretariat daerah, pengelolaan kepegawaian dan kearsipan sekretariat daerah urusan rumah tangga dan aset sekretariat daerah, serta pengelolaan keuangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum;
- 2) pelaksanaan kegiatan kearsipan di lingkungan sekretariat daerah;
- 3) pelaksanaan pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- 4) pengelolaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) pelaksanaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- 6) pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- 7) pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- 8) penyelenggaraan urusan penerimaan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 9) pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengadministrasian aset Sekretaris Daerah;
- 10) pengelolaan dan pengendalian kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah
- 11) pengelolaan dan pengendalian perjalanan dinas pimpinan dan umum;
- 12) pelaksanaan koordinasi administrasi dan pembayaran gaji;
- 13) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 14) pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan keuangan dan barang daerah;
- 15) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol yang dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas mengelola informasi dan dokumentasi pimpinan daerah, melaksanakan urusan protokoler daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkandan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan humas dan protokol ;
 - 3) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 4) Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sekretaris daerah;
 - 5) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media dalam rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah;
 - 6) Penyusunan program dan/atau kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
 - 7) Penyusunan naskah informasi walikota ;
 - 8) Perencanaan dan pelaksanaan jumpa pers dengan walikota ;
 - 9) Penyusunan dan penyelenggaraan acara protokoler dinas ;
 - 10) Pelaksanaan dokumentasi kegiatan walikota;
 - 11) Pelaksana juru bicara pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk walikota;
 - 12) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah;
 - 13) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sekretariat daerah secara berkala melalui *sub domainwebsite* pemerintah daerah;
 - 14) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi sekretariat daerah;
 - 15) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang hubungan masyarakat;
 - 16) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan

permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta mengoordinasikan, memfasilitasi dan mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik daerah, perencanaan program sekretariat daerah serta memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sedangkan fungsinya adalah:

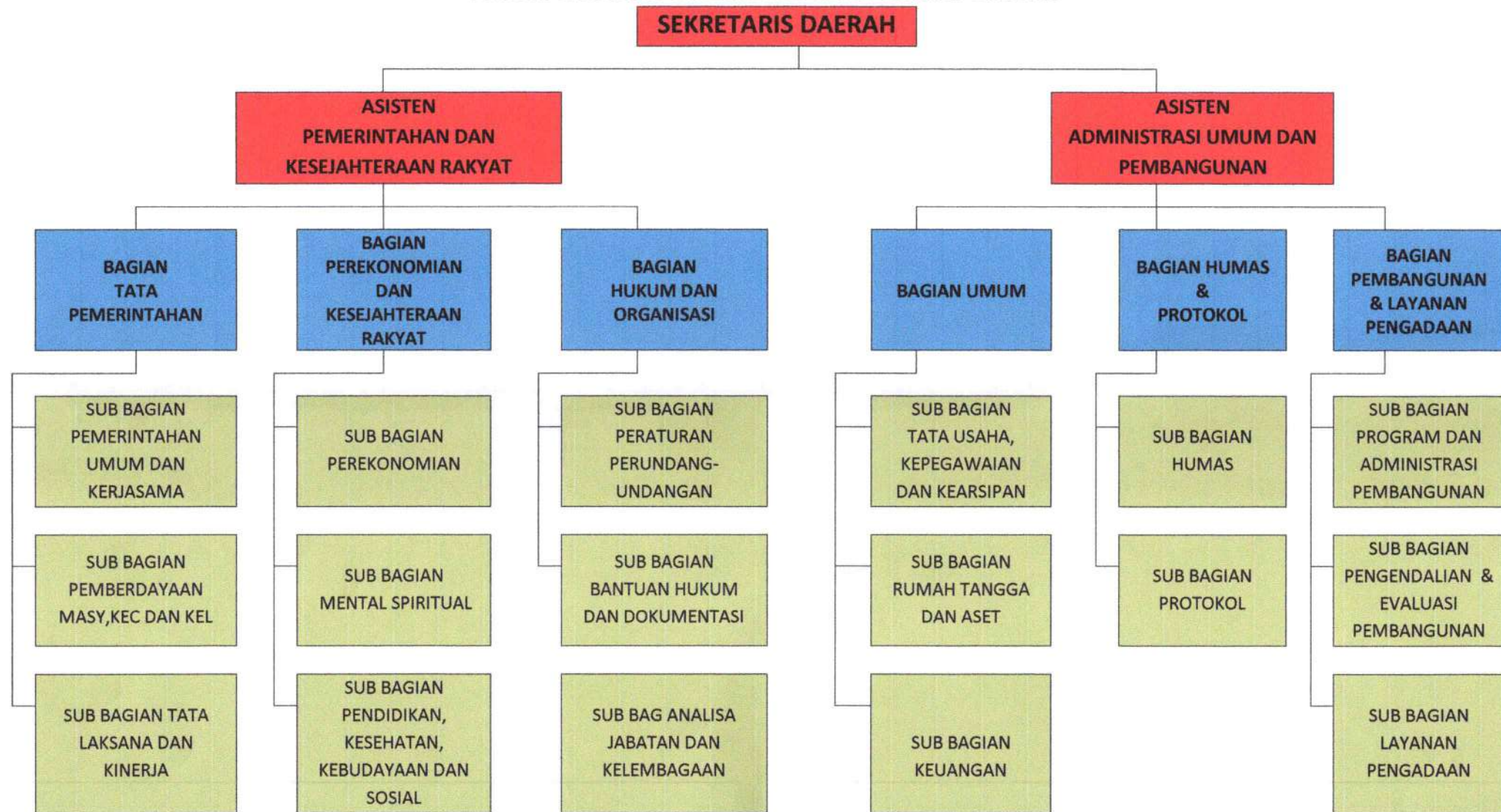
- 1) Perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Sekretaris Daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta penyusunan program dan pelaporan kinerja sekretariat daerah;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan di bagian pembangunan dan layanan pengadaan;
- 4) Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengoordinasian administrasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- 7) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP ;
- 8) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- 9) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota;
- 10) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- 11) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing- masing Kelompok Kerja ULP;

- 12) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
- 13) Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
- 14) Fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (*e-procurement*);
- 15) Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
- 16) Mengelola system informasi manajemen pengadaan barang/jasa yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;
- 17) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas Layanan Pengadaan;
- 18) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 19) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 20) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 21) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 22) Penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
- 23) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
- 24) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sebagai gambaran akan Susunan Organisasi hubungan antar unsur pada Sekretariat Daerah dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Struktur organisasi Sekretariat Daerah saat ini adalah merupakan struktur Lembaga yang mempunyai 1 (satu) orang pejabat struktural eselon IIA, 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IIB, 6 (enam) pejabat struktural eselon IIIA dan 17 (tujuh belas) pejabat struktural eselon IVA yaitu dengan komposisi seorang Sekretaris Daerah dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta bidang Administrasi Umum dan Pembangunan dimana masing – masing Asisten membawahi tiga Kepala Bagian.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada bulan Juni 2018, sumber daya aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebanyak 83 orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu S-2 sebanyak 8 orang, SI/D4 sebanyak 39 orang, Diploma 6 orang, SLTA 27 orang, dan selebihnya sebanyak 2 orang berlatar belakang SLTP dan SD. Di samping itu, sarana prasarana dan sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas telah tersedia dan memadai. Kondisi yang demikian menjadi modal yang cukup ideal dalam mewujudkan Sekretariat Daerah sebagai daya dukung utama kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

Gol	Kode	Nama Barang	Jml	Harga (Rp.)
01	01	Tanah	45	114.422.810.229,00
02	02	Alat-Alat Besar, pertanian, angkutan, kantor dan rumah tangga, studio dan komunikasi, kedokteran, laboratorium, ukur dll	2941	26.050.333.453,56
03	11	Bangunan Gedung	31	15.386.314.425,00
04	15	Instalasi dan jaringan	6	953.774.100,00
05	17	Buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak dan tumbuhan	312	408.900.600,18
07		Aset Tidak Berwujud	18	851.542.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pengukuran atas kinerja perangkat daerah merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja kegiatan ini didasarkan atas 3 (tiga) indikator capaian kinerja yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil), sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021
Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET SPM	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
2	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
3	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%66'66	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	%66'66
4	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
5	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET SPM	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
8	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
9	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	91,57%	89,72%	96,69%	N/A	N/A	N/A	N/A	105,55%	107,44%
10	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	baik	baik	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
11	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	baik	baik	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	baik	baik	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	baik	baik	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Tabel 2.3.2

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2016

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN	REALIS ASI
1	PENDAPATAN	159.156.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-	185.409.207	-	-	-	5.729	-	116%	0%	0%	0%	100%	0	0,0%	0,0%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.156.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-	185.409.207	-	-	-	5.729	-	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.156.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-	185.409.207	-	-	-	5.729	-	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN 0,0%	REALIS ASI 0,0%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
	Jumlah	159.156.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-	185.409.207	-	-	-	5.729	-	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN	REALIS ASI
2	BELANJA	27.559.862.844	24.830.421.676	36.988.071.730	33.921.579.414	30.661.019.312	33.267.132.396	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408	31.088.892.122	97%	95%	91%	83%	92%	93%	5,9%	5,0%
2.1	BELANJA OPERASI	23.213.489.374	21.514.033.394	24.911.659.010	26.025.829.639	25.124.464.237	29.839.856.096	22.535.683.025	20.297.497.256	23.365.066.648	20.373.022.452	22.969.908.208	27.815.432.237	97%	94%	94%	78%	91%	93%	5,6%	5,2%
2.1.1	Belanja Pegawai	12.611.420.044	6.943.950.545	6.598.394.710	7.091.614.349	7.142.496.092	8.288.730.919	12.371.228.071	6.426.717.720	6.287.146.102	6.044.808.884	6.755.803.388	7.765.514.520	98%	93%	95%	85%	95%	94%	-5,1%	-5,5%
2.1.2	Belanja Barang	10.602.069.330	14.570.082.849	18.313.264.300	18.934.215.290	17.981.968.145	21.551.125.177	10.164.454.954	13.870.779.536	17.077.920.546	14.328.213.568	16.214.104.820	20.049.917.717	96%	95%	93%	76%	90%	93%	16,3%	16,1%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN	REALIS ASI
2.2	BELANJA MODAL	4.346.373.470	3.316.388.282	12.076.412.720	7.895.749.775	5.536.555.075	3.427.276.300	4.281.518.700	3.203.581.350	10.444.087.875	7.612.816.550	5.384.504.200	3.273.459.985	99%	97%	86%	96%	97%	96%	27,6%	21,1%
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.067.373.470	3.164.132.282	11.989.482.720	6.828.691.775	3.576.061.975	1.629.908.800	3.021.270.650	3.051.725.350	10.393.286.375	6.578.687.450	3.430.886.000	1.561.500.385	98%	96%	87%	96%	96%	96%	27,4%	20,5%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.058.500.000	21.156.000	36.000.000	701.008.000	1.830.393.100	1.727.500.000	1.040.748.050	21.156.000	-	671.279.200	1.824.279.000	1.648.094.500	98%	100%	0%	96%	100%	0%	395,0%	0,0%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	75.400.000	35.000.000	350.000.000	75.000.000	-	-	75.050.000	34.951.500	348.999.900	74.645.200	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0,0%	0,0%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	166.600.000	55.700.000	15.930.000	16.050.000	5.100.000	13.867.500	165.600.000	55.650.000	15.850.000	13.850.000	5.100.000	12.865.000	99%	100%	99%	86%	100%	93%	-6,7%	-12,3%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN 0%	REALIS ASI 0%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	53.900.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	53.900.000	-	-	-	49.594.000	49.500.000	100%	0%	0%	0%	0%	99%		
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah	27.559.862.844	24.830.421.676	36.988.071.730	33.921.579.414	30.661.019.312	33.267.132.396	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408	31.088.892.122	97%	95%	91%	83%	92%	93%	5,9%	5,0%
2.4	TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Belanja	27.559.862.844	24.830.421.676	36.988.071.730	33.921.579.414	30.661.019.312	33.267.136.396	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408	31.088.892.122	97%	95%	91%	83%	92%	0%	-15,8%	-16,9%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN	REALIS ASI
	Surplus/(Defisit)	-27.400.706,844	-24.825.921,676	-36.986.071,730	-33.921.579,414	-30.661.019,312	-33.267.136,396	-26.631.792,518	-23.501.078,606	-33.809.154,523	-27.985.839,002	-28.354.406,679	31.088.892,122	97%	95%	91%	83%	92%	0%	-37,4%	-38,7%
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84.467,818	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1	PENERIMAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84.467,818	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84.467,818	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.7	Dana Talangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGA RAN 0%	REALIS ASI 0%
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84.467.818	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2	PENGELUARAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.5	Dana Talangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pembiayaan Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84.467.818	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-27.400.706.844	-24.825.921.676	-36.986.071.730	-33.921.579.414	-30.661.019.312	-33.267.136.396	-26.631.792.518	-23.501.078.606	-33.809.154.523	-27.985.839.002	-28.438.874.497	-31.088.892.122	97%	95%	91%	83%	93%	93%	-15,7%	-16,7%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
1	Terkoordinasinya antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bermitra kerja terhadap proses pembangunan sosial, merupakan suatu peluang dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan	Mengingat belum seluruhnya masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan urusan sosial, maka merupakan suatu tantangan untuk mengoptimalkan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui regulasi kebijakan sosial
2	Adanya data-data urusan sosial kemasyarakatan yang akurat memberikan kelancaran dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat, serta memudahkan dalam penyusunan kebijakan sosial	Populasi yang tidak terkendali dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, pencari kerja (pengangguran), dan masalah sosial lainnya
3	Keterlibatan OPD terkait dalam penanganan masalah sosial merupakan peluang dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan guna menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaannya	Merupakan suatu tantangan dalam memadukan data dan informasi, mengingat masing-masing OPD berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan
4	Dinamisnya produk hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi pengambil kebijakan di daerah	Pemerintah daerah harus menganalisa dan mengkaji produk hukum sebelum menerapkannya di daerah
5	Teknologi informasi di bidang hukum yang semakin berkembang memudahkan terpublikasinya produk hukum sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	Perlu kecermatan dan ketelitian sebelum produk hukum daerah di publikasikan sehingga meminimalkan terjadinya konflik hukum
6	Dinamisnya perkembangan ilmu hukum memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan bagi permasalahan di daerah yang semakin kompleks	Perlunya penguatan kualitas SDM aparatur bagian hukum sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kualitas analisa hukum sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah
7	Deregulasi media massa dan perkembangan teknologi media massa menjadikan informasi pemerintahan dan pembangunan semakin mudah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.	Berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dengan segala hak dan kewajibannya.
8	Semakin menguatnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap tata aturan keprotokolan menjadikan acara dan kegiatan lebih tertib dan sesuai standard dan etika keprotokolan.	Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengharuskan penataan kembali dalam hal tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara.
9	Saat ini kelembagaan sudah ada dan terus disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang Organisasi Perangkat Daerah	Belum adanya mekanisme tata kerja yang diatur resmi.
10	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Semakin mudahnya pengambilan data menuntut cepatnya pelayanan kepada SKPD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks berdasarkan kondisi masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal Sekretariat Daerah.
2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk mengendalikan/mengontrol penggunaannya.
3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.
4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah terkesan sama dengan monev yang dilaksanakan oleh Bappeda, sehingga pelaksanaannya kurang bermanfaat
7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja
8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional
10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan protokol harus segera menyesuaikan diri.
11. Lahirnya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN OPD)	
Rentang kendali Organisasi	Setda terdiri dari 6 bagian	Standar Beban Kerja dan Analisis Jabatan	Adanya Perubahan Perda Struktur Organisasi Pemda	Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016	Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi
Dinamika Produk Hukum daerah	Sinkronisasi produk hukum satu dengan produk hukum lainnya	Standar/SOP Pembuatan Perda,Perwali, Keputusan Walikota	Pembuatan Draft Perda dan Perwali serta Keputusan Walikota	Adanya kebijakan dan aturan dari Pemerintah Pusat yang tidak jarang kurang sinkron satu dengan lainnya	Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum Lainnya
Ketersediaan Data kemasyarakatan dan Keagamaan	Data Sudah ada tetapi perlu dilengkapi dan divalidasi	SOP Penyaluran Dana Hibah/Banso, SOP Perumusan Kebijakan di bidang Sosial dan Kesra	Pembuatan Kebijakan di bidang sosial, keagamaan, dan kesra	Telah ada data PPLS dari BPS	Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
Pembedaan Fungsi Staffing dan Fungsi Lini	Setda terus berupaya diposisikan sebagai perumus kebijakan atau Fungsi Staffing	Perda SOTK, Tugas Pokok Fungsi OPD dalam Peraturan Wali Kota,	Saat ini Telah ada SOTK dan Perwali Tentang Kelembagaan dan Tupoksi Setda	Setda Perlu lebih diarahkan fungsinya menuju fungsi Staffing	Kurangnya Tepatnya Fungsi Setda yang dalam kenyataannya masih menjalankan fungsi lini dan fungsi staff.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN OPD)	
Perubahan paradigma Kehumasan dan Keprotokolan	Fungsi Kehumasan dan keprotokolan telah berjalan namun perlu menyesuaikan dengan aturan baru	Standar Informasi Publik, Standar Kehumasan Pemerintah, dan Standar keprotokolan	Tingkat Ketramplilan / Skill Aparatur dalam menjalankan fungsi Kehumasan dan Keprotokolan	Terbitnya UU No 9 Tahun 2010 tentang keprotokolandan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru
Updating sistem Informasi elektronik dalam hal evaluasi Pelaksanaan kegiatan	Telah ada admin e – monev namun perlu ditingkatkan lagi Sinkronisasi	Standar Ketepatan Waktu dan Akurasi Data E – Monev dari Seluruh OPD	- Pmbinaan terhadap admin e-monev - pengendalian pelaksanaan kegiatan (monitoring)	updating data dari SKPD pelaksana kegiatan	Kurangnya pembinaan terhadap admin e-monev, kurangnya pengendalian pada pelaksanaan kegiatan
Kebijakan Ekonomi Kreatif Tanpa Menggalkan Ekonomi Kerakyatan	Telah ada beberapa kajian ekonomi kreatif tetapi masih belum ada fokus	Sub-Sub Sektor ekonomi kreatif	Kebijakan dan format ekonomi kreatif kota blitar	Pemberlakuan MEA	Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi
2. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi lini
3. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum Lainnya
4. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru
6. Kurangnya penerapan fungsi pengendalian, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dengan memanfaatkan system e-monev
7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan bimtek
2. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi
3. Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum melahirkan produk hukum daerah
4. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan keprotokolan
6. Peningkatan kompetensi admin e – monev
7. Peningkatan sinkronisasi kebijakan dan format pembangunan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan daya dukung potensi lokal yang ada

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka program Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

**“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat
pada Tahun 2021”**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi masing masing bagian Sekretariat daerah adalah pada misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat dan misi 6 (enam) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian-bagian di sekretariat daerah adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dengan sasaran meningkatnya kemakmuran tempat ibadah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Intervensi sekretariat daerah adalah pada capaian indikator sasaran prosentase tempat ibadah yang aktif, rasio pengajar ilmu gama dengan jumlah penduduk, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota (nilai SAKIP), dan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota blitar (nilai LPPD).

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bagian-Bagian Di Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan, sebagaimana diuraikan tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

NO	MISI WALIKOTA BLITAR DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	- Rendahnya kesadaran beragama masyarakat - Rendahnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama - Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan di daerah	- Keberadaan organisasi/ kelompok keagamaan yang belum berpengaruh terhadap masyarakat sekitar - Kurangnya aktivitas/kegiatan di tempat ibadah - Lemahnya peran dan fungsi tenaga pengajar agama - Kurangnya koordinasi bidang sosial keagamaan antara masyarakat dengan pemerintah - Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan - Terbatasnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang ada dalam organisasi	- Meningkatkan eksistensi organisasi/ kelompok keagamaan di tingkatan masyarakat - Meningkatkan fungsi tempat ibadah melalui fasilitasi kegiatan - Meningkatkan fasilitasi dan peran tenaga pengajar agama - Peningkatan koordinasi bidang sosial keagamaan antara pemerintah dengan masyarakat

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	MISI WALIKOTA BLITAR DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		-	- Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja - Masih lemahnya pemahaman Tupoksi aparatursehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi baik antar elemendalam organisasi maupun antar instansi/lembaga terkait	
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	- Penetapan indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) - Belum termanfaatkannya IKU di dalam dokumen perencanaan - Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dibuktikan dengan hasil penilaian terhadap LPPD dan LAKIP yang belum sesuai yang diharapkan	- Pemahaman yang beranekaragam dari masing-masing SKPD tentang aturan aturan terkait dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja - Adanya mutasi personal penyusun SAKIP - Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dibuktikan dengan hasil penilaian terhadap LPPD dan LAKIP yang belum sesuai yang diharapkan	- Komitmen Pimpinan SKPD terhadap penerapan SAKIP - Motivasi dan semangat seluruh personil bagian Tata Pemerintahan dan juga diimbangi dengan suasana kerja dan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif antar seluruh personil dalam menghadapi tantangan dan beban kerja yang ada.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	MISI WALIKOTA BLITAR DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		-	- Sumberdaya Manusia yang terbatas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan beban kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan - Belum tersedianya data yang valid dan akurat mengenai pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana masih terdapat beberapa versi data yang berbeda yang menyulitkan ketika proses analisa data untuk dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu sinkronisasi dan validasi data yang melibatkan tim teknis lintas OPD.	- Jaringan komunikasi yang baik antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan dengan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Blitar, termasuk juga jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar dengan Bagian Pemerintahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD provinsi jawa timur adalah sebagai berikut “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan Mandiri, Berdaya Saing Dan Berakhlak” sejalan dengan visi Kota Blitar Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021. Oleh karenanya Kota Blitar dalam melaksanakan visi tersebut dan mendorong tercapainya visi misi jawa timur yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlu melakukan koordinasi dengan provinsi Jawa Timur dengan fokus misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam
Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Rencana Tata Ruang Kota Blitar sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Permasalahan dalam Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang hubungan antar kawasan	Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kurangnya pemahaman OPD bahwa Sekretariat Daerah adalah pengoordinasi kebijakan daerah	Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pelayan administratif instansi daerah
2	Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah terdapat beberapa hal yang menjadi acuan:

3.5.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai Organisasi penyusun kebijakan Sekretariat Daerah memegang kunci arah kebijakan Kota Blitar, hal ini tentunya banyak memperoleh hambatan maupun tantangan.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah penataan kebijakan dan kelembagaan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.5.3 Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sebenarnya tidak memiliki implikasi langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diterbitkan produk hukumnya sehingga pembangunan di Kota Blitar berjalan sesuai koridornya.

3.5.4 Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Seperti halnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Sekretariat Daerah tidak memiliki implikasi secara langsung, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga Pembangunan Kota Blitar akan berwawasan lingkungan guna peningkatan kualitas tata ruang serta peningkatan daya dukung lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan Isu-isu strategis di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Cukup Memuaskan dengan predikat sangat tinggi, akan tetapi perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar mendapatkan peringkat 10 besar secara nasional secara terus menerus.

2. Frekuensi dan kualitas kerjasama antar Pemerintah Daerah masih kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan penjajakan kerjasama Antar Daerah terutama dengan Daerah yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kota Blitar, dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar (Terutama dalam bidang Teknologi Informasi, Pariwisata, Pendidikan, dan lain-lain).
3. Masih kurangnya kualitas komunikasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Masyarakat yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, sehingga perlu secara rutin dilaksanakan atensi dan komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan.
4. Ketidakharmonisan Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
5. Perlunya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Atas Kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Lengkap, Akurat, Mudah dan Cepat.
6. Banyaknya Permasalahan Hukum terkait Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan
7. Perlunya peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama agar semakin kondusif serta untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
8. Semakin tingginya minat masyarakat untuk berurusan di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, utamanya terkait dengan permohonan bantuan sosial dan hibah.
9. Perlunya regulasi pengelolaan kegiatan raskin/rastra melalui Tim Tingkat Kota, mulai dari perencanaan, kelancaran pelaksanaan, sampai dengan pelaporannya.
10. Perlunya data base yang akurat meliputi : data rumah tangga miskin, fakir miskin, janda miskin, anak yatim, pengajar agama non formal, tokoh agama, tempat ibadah, yayasan/panti sosial, dll
11. Perlunya peningkatan pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar
12. Perlunya penanganan Inflasi Daerah yang berkesinambungan.
13. Perlunya pengembangan BUMD
14. Perlunya pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat
15. Perlunya koordinasi yang lebih intensif terkait pemanfaatan DBHCHT.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

16. Perlunya peningkatan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan guna mempercepat penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan
17. Perlunya peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijakan di bidang administrasi pembangunan
18. Percepatan Realisasi Anggaran perlu didukung dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang akuntabel, efektif dan efisien.
19. Adanya Dinamisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa sehingga setiap Personil Organisasi Pengadaan wajib untuk selalu meningkatkan pengetahuan perihal Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penguatan kelembagaan yang kaya fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
21. Inovasi Pelayanan Publik dalam meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat.
22. Kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah melalui penilaian SAKIP (melalui Integrasi Data RPJMD, RENSTRA, RENJA, Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan)
23. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui instrumen standarisasi pelayanan publik seperti standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
24. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
25. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur;
26. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada.
27. Kewajiban Perusahaan Pers berbentuk PT dan Wartawan Wajib Lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
28. Perlunya Pengembangan CITY BRANDING dan Peningkatan Publikasi di Media Nasional;
29. Relasi Pemerintah Daerah dengan Unsur FORKOPIMDA Sesuai Undang-Undang Keprotokolan Nomor 9 tahun 2010 ;

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel 3.5.4.1 berikut:

Tabel 3.5.4.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis
(Lingkungan Eksternal) Sekretariat Daerah

NO	ISU - ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL / LOKAL	LAIN-LAIN
1	Trend Pemerintahan Dunia yang mengarah pada isu desentralisasi dan perluasan otonomi daerah	Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016	Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan perumus kebijakan Kepala Daerah harus mampu melahirkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan sekaligus sesuai dengan karakteristik potensi lokal
2	Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mengharuskan adanya kebijakan daerah tentang ekonomi lokal	Pengarusutamaan ekonomi Kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif tanpa meninggalkan ekonomi kerakyatan	Sekretariat Daerah perlu mencari format ekonomi ekonomi kreatif tanpan meninggalkan ekonomi kerakyatan yang tepat dan sesuai dengan sumber daya lokal
3	Perkembangan teknologi informasi yang memberikan kecepatan layanan data	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada satu SKPD menjadi informasi bagi SKPD lainnya	Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah akan memudahkan penyusunan program berikutnya sekaligus pelaporannya

BAB IV

TUJUANDAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel **Tabel 4.1.1**, **Tabel 4.1.2** dan **Tabel 4.1.3** sebagai berikut:

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2016-2017

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TUJUAN :						
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif dibagi jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100%	62%	70%	62%	
			Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.				
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama dibanding Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	1:86	1 : 85	1:86	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN :						
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	5%	10%	5%	
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Jumlah pengajar agama yang terfasilitasi dibagi jumlah pengajar agama x 100%	85%	90%	85%	
2	TUJUAN :						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar	B	B	B	BB
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN :						
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%
		4. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B	B	CC	BB
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	90%	90%	90%	93%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tabel 4.1.2

TujuandanSasaranJangkaMenengahSekretariat Daerah 2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018
1	2	3	4	5
1	TUJUAN :			
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase tempat ibadah aktif Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1.Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3.Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif. Jumlah pengajar agama : Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	78% 1 : 84
	SASARAN :			
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi / Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	26%
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Jumlah pengajar agama yang terfasilitasi/jumlah pengajar agama x 100%	95%
2	TUJUAN :			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar	BB
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018
1	2	3	4	5
	SASARAN :			
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %	100%
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		4. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018
1	2	3	4	5
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	91%
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip	BAIK
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK

Tabel 4.1.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2019 – 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	TUJUAN :					
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.	83%	92%	100%
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama : Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	1 : 83	1: 82	1 : 80
	SASARAN :					
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	32%	39%	46%
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Jumlah pengajar agama yang terfasilitasi dibagi jumlah pengajar agama x 100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
2	TUJUAN :					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar	BB	BB	A
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	SASARAN :					
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya x 100 %	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		4. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		5. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B	B	B

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang dibagi Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	92%	93%	94%
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip)	BAIK	BAIK	BAIK
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK	BAIK	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK	BAIK	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah adalah strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat daerah menunjukkan bagaimana cara Sekretariat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

Tabel5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan

Sekretariat Daerah

VISI : MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021			
MISI : 1. MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kan kemakmur an tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyar akat	1 Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1 Mewujudkan Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	1 Peningkatan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembinaan terhadap pengajar agama
MISI :6. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kan akuntabilit as kinerja pemerintah daerah	1 Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	1 Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
	2 Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	2 Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja OPD 1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	1 Melaksanakan evaluasi, analisis kepegawaian (analisa jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan) OPD sesuai peraturan perundang-undangan 1 Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2 Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	1 Peningkatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
		3 Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	1 Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		4 Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui monitoring rutin	1 Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan dan Kelurahan
		5 Mendorong lembaga kemasyarakatan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap program Pemerintah Daerah	1 Fasilitasi, komunikasi, dan koordinasi serta pembinaan rutin terhadap seluruh lembaga kemasyarakatan mitra pemerintah
		6 Meningkatkan Fungsi Koordinasi, konsultasi dan Fasilitasi serta Perumusan Kebijakan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan	1 Peningkatan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat
		7 Mengkoordinasikan arah kebijakan promosi ekonomi bersama SKPD terkait	1 Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif
		8 Menerapkan tata kelola BUMD yang baik	1 Optimalisasi pengelolaan BUMD
		9 Meningkatkan profesionalisme birokrat	1 Optimalisasi pengelolaan DBHCHT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		10 meningkatkan kualitas monitoring, pelaporan dan pembinaan administrasi pembangunan secara berkala	1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
	3 Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 Peningkatan kualitas layanan pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan	1 Perumusan kebijakan penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	4 Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta keprotokolan	1 Peningkatan kualitas administrasi ketatausahaan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	1 Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan yang didukung oleh sistem manajemen surat, dan arsip yang baik
			2 Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang layak dan representatif
			3 Mewujudkan sistem administrasi pengelolaan keuangan Setda yang efektif, efisien transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman dan kaedah yang berlaku
			4 Menciptakan dan meningkatkan mutu pelayanan KDH/WKDH dan tamu daerah
		2 Monitoring Media dan Media Handling Assesment	1 Meningkatkan Pengelolaan berita daerah Berbasis Media Planning
		3 Penarapan Standar dan Sosialisasi Keprotokolan	1 Penerapan prinsip dan asas keprotokolan disesuaikan dengan konteks lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang pro rakyat yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Blitar 2016-2021, masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Blitar membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah. Dan untuk melihat uraian target indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik program dan kegiatan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 diuraikan dalam table-tabel sebagai berikut:

1. Tabel 6.1.1 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016
2. Tabel 6.1.2 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017
3. Tabel 6.1.3 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018
4. Tabel 6.1.4 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 - 2021

Tabel 6.1.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan daerah	Nilai LPPD yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	1	20	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	100 %	230.677.379	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			1	20	16	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jenis dokumen yang tersusun	3 jenis	3 jenis	131.103.640		
			1	20	16	09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun	Jenis dokumen yang tersusun	3 jenis	3 jenis	79.495.100		
			1	20	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah	-	3 kegiatan	20.078.639		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
	Meningkatnya efektifitas sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Blitar	Persentase tanah milik Pemkot Blitar yang bersertifikat	1	20	16		PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase tanah asset bersertifikat	89 %	95 %	276.140.693	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			1	20	16	01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Sertifikasi dan Pembayaran PBB Tanah aset Pemerintah Kota Blitar	N/A	19 bidang	276.140.693		
Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara pemerintah kota, provinsi dan luar negeri	Terwujudnya kerjasama atardaerah dan luar negeri	Persentase kesepakatan bersama kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama	1	20	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah	65 %	87 %	242.718.150	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			1	20	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain	4 jenis	3 jenis	69.149.050		
			1	20	25	05	Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI	Jumlah Pelaksanaan Rakernas dan Muskomwil APEKSI	2 kegiatan	3 kegiatan	173.569.100		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga kemasyarakatan kelurahan	Persentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi Asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah	1	20	32		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Persentase lembaga yang memperoleh asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan	60 %	60 %	538.971.035	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			1	20	32	01	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas otoda Fasilitasi HUT Provinsi Jawa Timur	4 kali	4 kali	218.250.485		
		Persentase Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mendapatkan pembinaan	1	20	32	02	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan perangkat Kecamatan Kelurahan	3 kecamatan	3 kecamatan	116.218.550		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
		Persentase lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPMK) yang aktif	1	20	32	03	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah peserta pelaksanaan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan	N/A	798 Orang	204.502.000		
			1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80 %	80 %	30.158.900	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan internet di Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	3.372.000		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	26 jenis	46 jenis	8.353.700		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7 jenis	6 jenis	10.502.650		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	11 jenis	5 jenis	2.215.550		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar Nasional dan Regional yang disediakan	12 bulan	12 bulan	3.840.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi penyediaan makanan dan minuman rapat	12 kali	3 kali	1.875.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	80 %	100 %	26.369.000	BAGIAN TATA PEMERIN TAHAN	
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	23.369.000		
			1	20	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor	2 jenis	0 jenis	-		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	3.000.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	80 %	97 %	44.100.000	BAGIAN TATA PEMERIN TAHAN	
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah penyertaan pada penyelenggaraan event-event daerah	4 kali	5 kali	38.100.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terlaksananya publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan	1 kali	1 kali	6.000.000		
Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	20	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang	100 %	100 %	1.146.757.471	BAGIAN HUKUM	
			1	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	N/A	4 kegiatan	79.044.811		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	7 kali	96.407.200		
Mewujudkan Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum	Terwujudnya Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum	Presentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	1	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan	N/A	4 maca m himp unan	337.214.150		
			1	20	26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersedianya kajian	N/A	4 kali kajian	143.202.800		
Mewujudkan Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	Terwujudnya Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	Presentase Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	1	20	26	07	Fasilitasi bantuan hukum kedinasan	Tersedianya bantuan hukum	N/A	7 kali bantu an huku m	301.217.200		
			1	20	26	08	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	N/A	28 kali penyuluhan	119.302.200		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	26	09	Penyusunan Rencana Kerja Surat Keputusan Walikota	Tercapainya penyusunan SK Walikota	N/A	570 SK	11.657.900		
			1	20	26	10	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah	Tercapainya peningkatan penyusunan raperda	N/A	4 buah	47.466.910		
			1	20	26	11	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Raperwali yang tersusun	N/A	88 perwali	11.244.300		
			1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	N/A	52 %	34.260.500	BAGIAN HUKUM	
			1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya service komputer dan printer	N/A	36 kali	9.648.000		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	N/A	32 jenis	5.390.700		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan fotokopi	N/A	5 jenis	11.277.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	N/A	10 jenis	1.294.800		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku literatur	N/A	12 bulan	5.040.000		
			1	20	01		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack dan minuman	N/A	4 jenis	1.610.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	60 %	30.100.000	BAGIAN HUKUM	
			1	20	02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer dan kelengkapannya	N/A	4 jenis	18.900.000		
			1	20	02		Pengadaan Meubelair	Tersedianya meja komputer	N/A	2 unit	11.200.000		
			1	20	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus kerusuhan bernuansa SARA	0 kasus	0 kasus	1.125.863.410	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
		2. Persentase ketersediaan jumlah pengajar agama aktif	1	20	17	01	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Terjadinya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang semakin kondusif, melalui kegiatan isroji mi'roj, maulud nabi, idhul adha, safari romadhon, buka puasa romadhon bersama Walikota dengan Ulama, gema takbir, tahun baru hijriyah, peringatan HSN dan fasilitas MTQ Tk. Kota	N/A	11 kegiatan	1.125.863.410		
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat	1. Persentase rumusan kebijakan di bidang keagamaan	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	N/A	11 bulan	65.708.600	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya jasa/sewa internet speedy setiap bulan	N/A	11 bulan	5.013.600		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya paket alat tulis kantor	N/A	54 jenis	16.750.000		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	N/A	6 jenis	17.100.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	12 jenis	1.800.000		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi bagi karyawan sebanyak 2 jenis	N/A	12 bulan	5.520.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya paket makan minum rapat/kegiatan dan tamu sebanyak 4 jenis	N/A	9 bulan	19.525.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	N/A	88 %	9.719.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA 2016, DPPA 2016, RKA 2017/DPA 2017 Bagian Kesra Setda Kota Blitar	N/A	6 dokumen	9.719.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	N/A	96 %	56.700.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar	N/A	5 kegiatan	44.700.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terinformasikannya pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita di media cetak	N/A	2 kali	12.000.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A	80 %	17.570.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan sebanyak 3 jenis	N/A	3 jenis	11.270.000		
			1	20	03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan gedung kantor	N/A	4 jenis	6.300.000		
			1	20	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	N/A	100 %	89.739.400	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	22	09	Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi program raskin bersama instansi terkait melalui fasilitasi pemberian subsidi (penggantian harga tebus raskin) program raskin pusat, sosialisasi dan monev, serta rakor kegiatan	N/A	2 kegiatan	89.739.400		
		2. Persentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan											
		3. Persentase rumusan kebijakan di bidang kebudayaan											
		4. Persentase rumusan kebijakan di bidang kesehatan											

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
		5. Persentase rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat											
		6. Persentase permohonan hibah dan bansos yang dapat ditindaklanjuti											
		7. Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang sosial dalam daerah dan luar daerah											
		8. Persentase rumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan											

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga dan keterpaduan unsur penerapan ekonomi kreatif	Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif	Meningkatnya Peran dan Fungsi TPID	1	20	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan bidang ekonomi	N/A	92 %	230.776.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	
		Persentase rumusan kebijakan / rekomendasi pelaksanaan pameran promosi	1	20	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Laporan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi	N/A	4 Dokumen	92.115.500		
		Terbinanya BUMD	1	20	22		Fasilitasi Pengembangan BUMD	Laporan pengembangan BUMD Kota Blitar	N/A	2 Dokumen	84.053.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	22		Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	website ekonomi kreatif kota blitar dan buku potensi ekonomi kreatif kota blitar	N/A	4 Buku	54.607.500		
			1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	N/A	12 Bulan	38.863.550	BAGIAN PEREKONOMIAN	
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah pemeliharaan perawatan kerja	N/A	5 jenis	5.016.500		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	N/A	40 jenis	13.714.800		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	N/A	3 jenis	6.161.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	15 jenis	3.194.250		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	N/A	3 jenis	3.480.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	N/A	12 bulan	7.297.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	N/A	88 %	8.415.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	RKA, DPA, DPPA, SOP, Laporan Akhir Tahun CALK	N/A	5 Dokumen	8.415.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	N/A	99 %	48.153.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah kepesertaan pada even daerah dan hari besar nasional	4 even	5 even	48.153.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A	86 %	7.213.248	BAGIAN PEREKONOMIAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	N/A	5 Jenis	7.213.248		
			1	20	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase kenaikan realisasi PMDN	N/A	98 %	61.137.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	
			1	20	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Publikasi dan promosi potensi investasi daerah	N/A	12 kali	61.137.000		
		Presentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar	1	20	33		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase pelanggaran cukai rokok	N/A	98 %	244.203.476	BAGIAN PEREKONOMIAN	
			1	20	33	01	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai	Penyampaian ketentuan dibidang cukai	N/A	300 peserta	244.203.476		
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan	Meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Persentase SKPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data statistik daerah	99 %	99 %	19.925.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar	50 %	65 Buku	19.925.000		
			1	20	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik	N/A	73 %	496.772.436	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			1	20	21	13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penghargaan SKPD berprestasi	N/A	4 Laporan	496.772.436		
		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	100 %	12 penghargaan			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	1 paket	4 paket	8.896.000		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya paket alat tulis kantor 4 paket	2 paket	4 paket	16.335.800		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	4 paket	6.250.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	1 paket	4.609.000		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4 paket	3.840.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	4 paket	13.987.500		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90 %	98 %	34.477.860	BAGIAN ADMINIST RASI PEMBAN GUNAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran kedinasan 2 Paket	2 paket	2 paket	34.477.860		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100 %	93 %	109.169.200	BAGIAN ADMINIST RASI PEMBANGUNAN	
			1	20	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Perwali	1 Perwali	94.799.200		
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Fasilitasi Keberansertaan pada event Daerah dan hari besar nasional	6 event	5 event	14.370.000		
		Nilai SAKIP SETDA	1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	21.947.500	BAGIAN ADMINIST RASI PEMBANGUNAN	
			1	20	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip,LKPJ,LPPD, CALK	3 dokumen	4 dokumen	5.337.500		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Dokumen renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA, Renstra, SOP	4 dokumen	7 dokumen	16.610.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80 %	80 %	265.073.630	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	28 Jenis	28 Jenis	30.712.900		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	138.218.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 jenis	6 jenis	14.563.800		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Administrasi Perkantoran	2 jenis	3 jenis	3.480.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat/Kegiatan	16 kali	12 kali	3.900.000		
			1	20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan Luar Daerah	- kali	8 kali	74.198.930		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	165.204.845	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran	3 jenis	11 jenis	154.334.845		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan	4 jenis	4 jenis	10.870.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh peningkatan kapasitas	100 %	100 %	20.540.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah event daerah & HBN yang diikuti	5 kegiatan	5 kegiatan	14.450.000		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah informasi program/kegiatan	1 kali	1 kali	6.090.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	100 %	100 %	10.727.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jenis Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	6 jenis	6 jenis	10.727.000		
			1	20	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kapasitas Fiskal		1,72 WTP	401.700.825	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
			1	20	17	40	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	85 Paket	117 Paket	271.570.500		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	17	60	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis	250 Orang	250 Orang	130.130.325		
								Jumlah Forum Pengadaan yang dibentuk	- Forum	1 Forum			
								Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas	- Orang	32 Orang			
Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat, arsip dan sandi	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		1 : 12	4.865.007.917	BAGIAN UMUM	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Via Pos		3 jenis	3.125.000		
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan jaringan FO		4 jenis	857.437.470		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		45 jenis	46.425.950		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tercukupinya formulir/barang cetakan dan dokumen hasil penggandaan		49 jenis	101.095.950		
			1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik		36 jenis	95.454.150		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		7 Jenis	116.158.450		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		2 jenis	32.760.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Fasilitasi jalan sehat		12 kali	1.156.472.400		
								Fasilitasi halal bihalal		3 kali			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
								Fasilitasi konsumsi sekda		12 bulan			
			1	20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri		3 kali	1.413.025.067		
			1	20	01	19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pengemudi		40 Orang	1.026.566.240		
			1	20	01	20	Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi	Terlaksananya kegiatan Simasur dan Sandi		3 kegiatan	16.487.240		
			1	20	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rasio aparatur memperoleh fasilitas		1:1	37.320.000	BAGIAN UMUM	
			1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya Pakaian Dinas dan perlengkapannya		5 Jenis	37.320.000		
			1	20	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar pemerintah daerah		1:1	89.500.000	BAGIAN UMUM	
			1	20	24	06	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	Jumlah cinderamata		3 Jenis	89.500.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		1:1	119.250.000	BAGIAN UMUM	
								Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		1:12			
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Terlaksananya keberansertaan pada event Daerah dan Hari Besar Nasional		4 Jenis	113.250.000		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terselenggaranya penyebaran informasi SKPD		1 Jenis	6.000.000		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	1	20	18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN	Persentase Regulasi Bidang Keuangan yang dievaluasi		1:1	51.568.953	BAGIAN UMUM	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	18	06	Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan		8 Jenis	51.568.953		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan	1	20	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi		1:1	4.608.786.641	BAGIAN UMUM	
			1	20	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH		2 Jenis	4.608.786.641		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana	1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		1:5	3.191.282.634	BAGIAN UMUM	
								Meningkatnya sarana prasarana aparatur		1:5			
			1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Umbul-umbul dan bendera		50 buah	201.909.800		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
								Bendera		150 buah			
								Tiang bendera		100 lonjor			
								AC		7 Unit			
								Tempat Tidur		1 Unit			
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan		5 Unit	28.213.054		
			1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas		3 Jenis	574.777.400		
			1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pengecatan gedung/kantor Walikota		3 Jenis	1.616.280.900		
			1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		7 Jenis	603.541.480		
			1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		4 Jenis	149.910.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		5 Jenis	16.650.000		
Meningkatkan kualitas layanan informasi kehumasan	Meningkatnya Informasi Positif Pemerintah Kota Blitar	Rasio Jumlah berita positif di media massa	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		90 %	46.311.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah tersedianya bahan dan Alat Tulis kantor		12 bulan	20.000.000		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah tersedianya stopmap bagian, sambutan, lembar disposisi, amplop coklat dan fotocopi naskah dinas		12 bulan	2.740.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga		16 jenis	5.736.000		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	17.835.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase peningkatan penyebaran informasi melalui pendayagunaan media informasi		80 %	60.815.200	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	jumlah rakor kehumasan yang diselenggarakan dalam satu tahun		4 jenis	60.815.200		
			1	20	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar		100 %	1.042.963.750	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi melalui media TV, Radio, Media Cetak, dan media On Line, Fasilitas Kegiatan Menyambut Tahun Baru		5 jenis	1.042.963.750		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		75 %	123.765.563	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor		1 kegiatan	40.000.000		
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah tersedianya peralatan gedung kantor		5 jenis	68.565.563		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor		5 jenis	15.200.000		
			1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data statistik daerah		91 %	206.673.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bentuk foto dan video, spanduk, baliho, joglo, dan leaflet		8 jenis	206.673.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	31		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan		80 %	173.450.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	31	01	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai	jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media Tv, radio, media cetak, media on line, spanduk dan baliho		6 jenis	173.450.000		
Meningkatkan kualitas layanan tata upacara, tata penghormatan, dan tata tempat	Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan	Acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		70 %	77.640.200	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	05	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan bimtek keprotokolan		1 kali	53.145.200		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Blitar		5 jenis	24.495.000		
			1	20	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		%	90.668.500	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	24	06	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam penerimaan tamu tamu daerah		26 kegiatan	90.668.500		
			1	20	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah		%	1.878.270.317	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			1	20	16	02	Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	jumlah upacara yang dapat difasilitasi dalam satu tahun, fasilitasi HUT RI, Fasilitasi Hari Jadi Kota Blitar, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru		4 paket	1.878.270.317		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Kota	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		77 %	32.722.650	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia		100 %	11.967.500		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		5 jenis	9.971.950		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		5 jenis/tribulan	2.940.200		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		3 jenis/bulan	4.440.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	persentase penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu		77 %	3.403.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun		100 %	194.257.808	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan penetapan kinerja yang tersusun		2 jenis	194.257.808		
	Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi	1	20	30		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran		27 SKPD	375.961.743	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	30	04	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah kajian kelembagaan dan ketatalaksanaan		2 kajian	99.130.000		
			1	20	30	05	Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya		3 SKPD	136.411.418		
			1	20	30	06	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standar ketatalaksanaan		45 SKPD	112.160.525		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	30	25	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Kota Blitar		62 %	28.259.800		
			1	20	28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan		85 %	113.783.500	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	28	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun analisis jabatannya		47 SKPD	7.963.500		
			1	20	28	20	Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun kompetensi jabatan manjerialnya		3 SKPD	51.265.000		
			1	20	28	22	Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun analisa beban kerja		48 SKPD	4.015.000		
			1	20	28	24	Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi jabatan PNS		3 SKPD	50.540.000		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
	Meningkatnya standar pelayanan di SKPD/Unit kerja	Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		83 %	101.271.566	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 kegiatan	14.340.000		
			1	20	27	09	Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah SKPD yang memiliki KBK		20 SKPD	80.931.566		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan yang dilaksanakan		1 kali	6.000.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		99 %	19.414.638	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		3 jenis	15.816.138		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan kantor		100 %	3.598.500		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata -rata IKM	1	20	29		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Persentase SKPD melaksanakan IKM		100 %	56.385.023	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
			1	20	29	04	Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO	Jumlah SKPD yang telah disertifikasi ISO		1 SKPD	56.385.023		

Tabel 6.1.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	4	01	25		PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Jumlah proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi	N/A	20 Proposal	2.272.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	4	01	25	01	Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan/even keagamaan yang difasilitasi	11 kegiatan	9 Kegiatan	1.772.500.000,00		
			4	01	25	02	Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina	1 kegiatan	10 Jenis	500.000.000,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	4	01	25		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	298.311.700,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	25	02	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah	4 kegiatan	10 buah	65.345.900,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	25	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah	N/A	15 Raperda	23.266.000,00		
			4	01	25	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah	Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	4 kali kajian	2 kali	100.150.000,00		
			4	01	25	09	Penyusunan Surat Keputusan Walikota	Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	570 SK	750 buah	20.524.800,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	25	10	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	4 buah	10 buah	67.687.700,00		
			4	01	25	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	88 perwali	60 buah	21.337.300,00		
			4	01	28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	85 %	77 %	38.632.500,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	28	06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	47 SKPD	150 Jabatan	38.632.500,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	30		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	27 SKPD	100 %	155.697.000,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	30	04	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi	2 kajian	1 Kajian	52.769.000,00		
			4	01	30	07	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah kebijakan penyalarsan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	N/A	2 Kebijakan	56.435.000,00		
			4	01	30	25	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil revidu yang tersusun	62 %	1 Dokumen	46.493.000,00		
			4	01	33		PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	100 %	627.344.000,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	33	01	Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan yang terfasilitasi	7 kali	2 kali	627.344.000,00		
			4	01	35		PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Publikasi dan penyebaran Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	375.674.500,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	35	01	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	4 macam himpunan	2 Jenis	137.763.500,00		
			4	01	35	02	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan	28 kali penyuluhan	6 Kali	144.659.100,00		
			4	01	35	03	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7 kali	6 kali	93.251.900,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	39		PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR	Persentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N	77 %	77 %	89.901.500,00	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	39	01	Penyusunan evaluasi jabatan	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	N/A	150 jabatan	55.002.900,00		
			4	01	39	02	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N	N/A	150 jabatan	19.800.000,00		
			4	01	39	03	Penyusunan Analisa Beban Kerja	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	48 SKPD	150 jabatan	15.098.600,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	4	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	121.931.300,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun LKj IP tepat waktu	N/A	29 SKPD	121.931.300,00		
			4	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan		5,6 %	2.499.065.100	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	15	04	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Partisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional		3 kegiatan	301.512.400		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	15	05	Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan propinsi		2 kegiatan	91.413.200		
			4	01	15	15	Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan		21 kelurahan	45.965.700		
			4	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	257.486.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	16	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang disusun	3 jenis	3 Jenis	176.340.500,00		
			4	01	16	09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang disusun	3 jenis	3 Jenis	81.146.000,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama antar daerah	87 %	87 %	331.593.300,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	24	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/lembaga/instansi lain	3 jenis	2 Kegiatan	102.404.600,00		
			4	01	24	05	Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI	2 kegiatan	2 kegiatan	229.188.700,00		
			4	01	31		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH	Persentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah	60 %	70 %	363.358.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	31	01	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	4 kali	6 Kegiatan	155.297.200,00		
			4	01	31	02	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	3 kecamatan	3 Kegiatan	129.722.700,00		
			4	01	31	03	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	798 Orang	3 Kegiatan	233.635.800,00		
			4	01	37		PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)	Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu	B	Tepat Waktu	116.293.050,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	37	02	Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah Partisipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi	1 Kali	1 kali	116.293.050,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	38		PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah OPD yang melaksanakan standar pelayanan	10 OPD	15 OPD	313.477.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4	01	38	01	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	100 %	28 OPD	260.598.100,00		
								Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan		24 OPD			
								Persentase hasil survey IKM OPD yang berpredikat baik		85 %			
			4	01	38	02	Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO	Jumlah OPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO	1 SKPD	1 OPD	52.879.500,00		
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang	4	01	19		PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN	Jumlah rumusan kebijakan / rekomendasi di bidang perekonomian	90 %	4 Kebij akan	314.164.150,00	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
		Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4	01	19	04	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi	Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID	-	5 Kali	137.657.200,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
								Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)	-	12 Bulan			
								Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)	-	2 Jenis			
			4	01	19	01	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah	Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah	N/A	5 Kali	80.225.150,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	19	02	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan	Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah	N/A	7 kali	80.907.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
								Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak		4 kali			
								Jumlah laporan hasil kegiatan		1 laporan			
			4	01	19	03	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD	Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD	2 Dokumen	2 Kali	109.638.500,00		
								Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD		2 buah			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	19	05	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	N/A	3 Kali	43.393.500,00		
			4	01	23		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat	30 %	45 %	228.250.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	23		Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra	Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)	2 kegiatan	15 Dokumen	156.000.000,00		
			4	01	23		Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan	Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun	0 Buku	1 Dokumen/buku	72.250.000,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Rp.		
			4	01	24	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat	15 %	100 %	3.400.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	24	Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan	jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan	- Kali	25 Kali	3.350.000.000,00		
			4	01	24	Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial	Jumlah proposal yang di verifikasi	- Organisasi/Lemba ga	20 proposal	50.000.000,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	36		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar	N/A	85 %	243.014.300,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	36	03	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	1 Kali	300 Orang	133.000.000,00		
			4	01	36	04	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi	4 Jenis	10 OPD	110.014.300,00		
	3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan		4	01	40		PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan	-	9 kebijakan	173.524.200,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	40	01	Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	1 Pedoman	1 Pedoman	91.381.300,00		
			4	01	40	02	Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	1 kali	78 Orang	29.259.200,00		
			4	01	40	05	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan	-	10 Kebijakan	52.883.700,00		
			4	01	42		PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan	40 %	50 %	404.233.100,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	42	03	Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 dokumen	4 Kegiatan	337.338.300,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
			4	01	42	04	Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	-	1 Dokumen	66.894.800,00		
		4. Nilai SAKIP Setda minimal B	4	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	35.668.700,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
			4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.300,00		
			4	01	06	5	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	6 Dokumen	15.669.400,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	4	01	43		PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement	96,69 %	90 %	880.694.700,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
			4	01	43	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan	117 Paket	95 Paket	607.099.700,00		
			4	01	43	02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	250 Orang	70 Orang	222.115.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
								Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja	-	30 Orang			
								Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja	32 Orang	30 Orang			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	43	03	Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95 Paket	95 Paket	51.480.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	4	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80 %	85 %	5.093.755.950,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	4 rekening	4 rekening	1.068.000.000,00		
			4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	45 jenis	49 Jenis	49.572.100,00		
			4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	49 jenis	2 Jenis	95.628.200,00		
			4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	36 jenis	6 Jenis	99.986.900,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Cindera mata	3 Jenis	3 Jenis	121.160.000,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	7 Jenis	4 Jenis	80.786.000,00		
			4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	2 Jenis	49.920.000,00		
			4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang difasilitasi penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	19 Kegiatan	963.929.000,00		
			4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	3 Kali	190 kali	1.267.564.350,00		
			4	01	01	19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi	40 Orang	48 Orang	1.297.209.400,00		
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	4	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	80 %	3.445.497.500,00	BAGIAN UMUM	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantoryang terpenuhi	5 Jenis	5 Jenis	179.566.400,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 Unit	6 Jenis	19.227.800,00		
			4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	900.646.300,00		
			4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	5 Jenis	1.403.248.800,00		
			4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	7 Jenis	17 Unit	709.930.000,00		
			4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis	2 Jenis	159.950.000,00		
			4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	5 Unit	72.928.200,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur memperoleh fasilitaskelengkapan dinas khusus	1:1	100 %	39.836.000,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Jenis pakaian dinas khusus	5 Jenis	5 Jenis	39.836.000,00		
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	4	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	66.651.400,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	06	08	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	8 Jenis	4 Jenis	66.651.400,00		
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan	4	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pelayanankedinasan KDH/WKDH	1:1	100 %	4.515.191.150,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah	2 Jenis	25 Jenis	4.515.191.150,00		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	07		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	100 %	100 %	135.000.000,00	BAGIAN UMUM	
			4	01	07	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah event daerah yang diikuti	5 event	5 event	75.000.000,00		
			4	01	07	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah informasi program dan kegiatan SKPD	1 Jenis	9 informasi	60.000.000,00	BAGIAN UMUM	
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	4	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase kegiatan Kepala Daerah yang didokumentasikan	91 %	80 %	197.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah:	8 jenis		197.000.000,00		
							Foto			3630 lembar			
							Shooting			3 kali			
							Spanduk			76 buah			
							Joglo			17 unit			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
								baliho		17 buah			
								mini banner		40 buah			
								umbul-umbul		40 buah			
								x banner		4 buah			
			4	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar	80 %	80 %	75.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta Bimtek Kehumasan	4 jenis	50 orang	75.000.000,00		
			4	01	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Blitar	100 %	100 %	1.488.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah jumpa pers dan publikasi pada media massa:	5 jenis		1.488.000.000,00		
								Jumpa Pers		2 kali			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
										Target	Rp.		
							Media Televisi		52 kali				
							Radio		539 kali				
							Media Cetak		315 kali				
							Media Online		1 kali				
			4	01	36		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase kegiatan DBHCHT yang dipublikasikan	80 %	100 %	200.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	36	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah publikasi pada media massa:	6 jenis		200.000.000,00		
								Media Televisi		1800 kali			
								Radio		900 kali			
								Media Cetak		89 kali			
								Spanduk		9 kali			
								Baliho		3 kali			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	07		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	70 %	100 %	265.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	07	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah kegiatan even daerah yang terfasilitasi dalam peringatan hari besar	5 jenis	7 Kegiatan	265.000.000,00		
			4	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan	65 %	100 %	2.204.061.300,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	16	12	Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan	4 paket	4 Kegiatan	2.204.061.300,00		
			4	01	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	%	100 %	98.500.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Target	Rp.		
			4	01	24	06	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi	26 kali	30 kunjungan	98.500.000,00		
			4	01	32	06	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase keikutsertaan OPD dalam bimtek keprotokolan	65 %	100 %	275.000.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			4	01	32	03	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan	1 kali	50 peserta	275.000.000,00		

Tabel 6.1.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2018		2019		2020		2021				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	01	02	03	11	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Prosentase tempat ibadah yang terfasilitasi	4	01	02	03	11	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	85 %	87 %	5.472.500.000	90 %	5.746.125.000	93 %	6.033.431.250	95 %	6.335.102.813	95 %	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	02	03	11	02	Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan	jumlah kegiatan yang terealisasi	9 kegiatan	10 kegiatan	1.772.500.000	10 kegiatan	1.861.125.000	10 kegiatan	1.954.181.250	10 kegiatan	2.051.890.313		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2018		2019		2020		2021				
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2. Prosentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	4	01	02	03	11	01	Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina	10 Jenis	10 Jenis	500.000.000	10 Jenis	525.000.000	10 Jenis	551.250.000	10 Jenis	578.812.500	10 Jenis		
			4	01	02	03	11	03	Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi	9 Unit	10 Unit	3.200.000.000	10 Unit	3.360.000.000	10 Unit	3.528.000.000	10 Unit	3.704.400.000	10 Unit		
									Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi	1757 Orang	1760 Orang		1765 Orang	1770 Orang		1770 Orang		1770 Orang	1770 Orang			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2018		2019		2020		2021				
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	4	01	02	02	06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	100 %	100 %	1.585.561.200	100 %	1.664.839.260	100 %	1.748.081.223	100 %	1.835.485.284	100 %	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI		
									Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
									Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 02 06 06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	2 kali	3 kali	100.150.000	3 kali	105.157.500	3 kali	110.415.375	3 kali	115.936.144	3 kali	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4 01 02 02 06 14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	10 buah	10 buah	90.953.700	10 buah	95.501.385	10 buah	100.276.45	10 buah	105.290.27	10 buah		
			4 01 02 02 06 16	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	60 buah	60 buah	86.683.200	60 buah	91.017.360	60 buah	95.568.228	60 buah	100.346.639	60 buah		
			4 01 02 02 06 18	Penyusunan Surat Keputusan Walikota	Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	750 buah	750 buah	20.524.800	750 buah	21.551.040	750 buah	22.628.592	750 buah	23.760.022	750 buah		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 02 06 01	Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi	3 Kali	3 Kali	627.344.000	3 Kali	658.711.200	3 Kali	691.646.760	3 Kali	726.229.098	3 Kali	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4 01 02 02 06 08	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di-web JDIIH Kota Blitar	3 Jenis	2 Jenis	137.763.500	2 Jenis	144.651.675	2 Jenis	151.884.259	2 Jenis	159.478.472	2 Jenis		
			4 01 02 02 06 13	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	6 kali	6 kali	144.659.100	6 kali	151.892.055	6 kali	159.486.658	6 kali	167.460.991	6 kali		
			4 01 02 02 06 05	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6 kali	6 kali	93.251.900	6 kali	97.914.495	6 kali	102.810.220	6 kali	107.950.731	6 kali		
			4 01 02 02 06 04	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil revidu yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	46.493.000	1 Dokumen	48.817.650	1 Dokumen	51.258.533	1 Dokumen	53.821.459	28 Dokumen		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI					
							2018		2019		2020		2021									
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
			4	01	02	02	06	12	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan	Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi	1 Kaji an	1 Kajian	52.769.000	1 Kajian	55.407.450	1 Kajian	58.177.823	1 Kajian	61.086.714	1 Kaji an	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
			4	01	02	02	06	03	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2 Ke bija kan	2 Kebijakan	56.435.000	2 Kebijakan	59.256.750	2 Kebijakan	62.219.588	2 Kebijakan	65.330.567	2 Ke bija kan		
			4	01	02	02	06	10	Penyusunan standar jabatan	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	150 jab ata n	300 jabatan	128.534.000	450 jabatan	134.960.700	600 jabatan	141.708.735	750 jabatan	148.794.172	750 jabat an		
									Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	150 jab ata n	300 jabatan	450 jabatan		600 jabatan	750 jabatan	750 jabat an						

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2018		2019		2020		2021				
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
								Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	150 jabatan	300 jabatan		450 jabatan		600 jabatan		750 jabatan		750 jabatan	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI			
	2. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan	1. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	4	01	02	01	05	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	2.098.328.750	100 %	2.203.245.188	100 %	2.343.407.447	100 %	2.642.577.819	100 %	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
								Prosentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	90 %	92 %		93 %		94 %		95 %		95 %				
								Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu				
								Prosentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan	80 %	85 %		90 %		95 %		100 %		100 %				

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 01 05 13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyusun LKjIP tepat waktu	29 OPD	29 OPD	393.224.350	29 OPD	412.885.568	29 OPD	433.529.846	29 OPD	455.206.338	29 OPD	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			4 01 02 01 05 16	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Jenis	6 Jenis	257.486.50	6 Jenis	270.360.82	6 Jenis	283.878.86	9 Jenis	480.072.81	9 Jenis		
			4 01 02 01 05 04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain	4 kerjasama	4 kerjasama	331.593.300	4 kerjasama	348.172.965	4 kerjasama	365.581.613	4 kerjasama	383.860.694	4 kerjasama		
			4 01 02 01 05 09	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	4 koordinasi	5 koordinasi	155.297.200	6 koordinasi	163.062.060	5 koordinasi	201.215.163	5 koordinasi	211.275.921	5 koordinasi		
			4 01 02 01 05 11	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	267.101.600	3 kegiatan	280.456.680	3 kegiatan	294.479.514	3 kegiatan	309.203.490	120 Orang		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
													2018		2019		2020		2021							
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
									Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan propinsi	2	Lomba	2	Lomba	2	Lomba	2	Lomba	2	Lomba	2	Lomba			BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
									Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan					
			4	01	02	01	05	06	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan				
									Jumlah Partisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencahangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan					

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	
							2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			4 01 02 01 05 18	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	28 OP D	29 OPD	158.477.600	29 OPD	166.401.480	29 OPD	174.721.554	29 OPD	183.457.632	29 OPD	BAGIAN TATA PEMERINTA HAN		
					Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24 OP D	24 OPD		24 OPD		24 OPD		24 OPD					
					Persentase Hasil survey IKM OPD yang berpredikat baik	85 %	90 %		94 %		98 %		100 %					
		2. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4 01 02 03 07	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIA N DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	880.071.350	100 %	924.074.918	100 %	970.278.663	100 %	1.018.792.597	100 %	BAGIAN PEREKONO MIAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT		
					Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan	4 kali	4 kali	150.000.000	4 kali	157.500.000	4 kali	165.375.000	4 kali	173.643.750			4 kali

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 03 07 02	Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan	Jumlah proposal yang diverifikasi	20 pro pos al	20 proposal	50.000.000	20 proposal	52.500.000	20 proposal	55.125.000	20 proposal	57.881.250	20 pro pos al	BAGIAN PEREKONO MIAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	
			4 01 02 03 07 07	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial	Jumlah rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial	5 ru mu san keb ijak an	5 rumusan kebijakan	156.000.000	5 rumusan kebijakan	163.800.000	5 rumusan kebijakan	171.990.000	5 rumusan kebijakan	180.589.500	5 rumusan kebijakan		
			4 01 02 03 07 08	Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan	1 Do ku me n	2 Dokumen	72.250.000	2 Dokumen	75.862.500	2 Dokumen	79.655.625	2 Dokumen	83.638.406	2 Dokumen		
			4 01 02 03 07 04	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi	Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID	5 kali	5 kali	137.657.200	5 kali	144.540.060	5 kali	151.767.063	5 kali	159.355.416	5 kali		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
													2018		2019		2020		2021							
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
			4	01	02	03	07	06	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM, Dan Sarana Perekonomian Daerah	Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)	12	bulan	204.525.650	12	bulan	214.751.933	12	bulan	225.489.529	12	bulan	236.764.006	12	bulan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
										Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)	2	Jenis		2	Jenis		2	Jenis		2	Jenis		2	Jenis		
										Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah	7	kali	7	kali	7	kali	7	kali	7	kali	7	kali				
										Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak	4	kali	4	kali	4	kali	5	kali	5	kali	5	kali				
										Jumlah laporan hasil kegiatan	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis				

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			40102030705	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD	Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD	2 kegiatan	2 kegiatan	109.638.500	2 kegiatan	115.120.425	2 kegiatan	120.876.446	2 kegiatan	126.920.269	2 kegiatan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD	2 buah	2 buah		2 buah		2 buah		2 buah		2 buah		
			401020313	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar	85 %	87 %	443.014.300	90 %	465.165.015	93 %	488.423.266	95 %	512.844.429	95 %	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			40102031302	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	300 Orang	300 Orang	333.000.000	300 Orang	349.650.000	300 Orang	367.132.500	300 Orang	385.489.125	300 Orang		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI			
													2018		2019		2020		2021							
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
									Jumlah publikasi pada media massa: Media Radio	900	siar	900	siar	900	siar	900	siar	900	siar	900	siar	BAGIAN PEREKONO MIAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT				
									Media Televisi	1800	siar	1800	siar	1800	siar	1800	siar	1800	siar	1800	siar					
									Media Cetak	89	terbit	89	terbit	89	terbit	89	terbit	89	terbit	89	terbit					
									Spanduk	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit					
									Baliho	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit					
			4	01	02	03	13	01	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Cukai	Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi	10	OPD	10	OPD	110.014.300	10	OPD	115.515.015	10	OPD	121.290.766	10	OPD	127.355.304		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2018		2019		2020		2021				
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		3. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	4	01	02	06	10	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	50 %	60 %	560.000.000	70 %	588.000.000	80 %	617.400.000	90 %	648.270.000	90 %	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN		
							Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan															
			4	01	02	06	10	04	Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	430.000.000	4 Dokumen	451.500.000	4 Dokumen	474.075.000	4 Dokumen	497.778.750	4 Dokumen			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 06 10 03	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	jumlah pedoman yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	80.000.000	1 Jenis	84.000.000	1 Jenis	88.200.000	1 Jenis	92.610.000	1 Jenis	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
			4 01 02 06 10 01	fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunanan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	50.000.000	10 Kebijakan	52.500.000	10 Kebijakan	55.125.000	10 Kebijakan	57.881.250	10 Kebijakan		
		4. Nilai SAKIP Setda minimal B	4 01 02 06 03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	100 %	70.000.000	100 %	73.500.000	100 %	77.175.000	100 %	81.033.750	100 %	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
			4 01 02 06 03 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.050.000	1 Dokumen	23.152.500	1 Dokumen		
			4 01 02 06 03 03	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	52.500.000	6 Dokumen	55.125.000	6 Dokumen	57.881.250	6 Dokumen		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											2018		2019		2020		2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	4	01	02	06	12	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Prosentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	96 %	97 %	880.694.700	98 %	924.729.435	99 %	970.965.907	100 %	1.019.514.202	100 %	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			4	01	02	06	12		01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	95	Paket Lelang/ Seleksi	96	Paket Lelang/ Seleksi	557.099.700	97	Paket Lelang/ Seleksi	584.954.685			98	Paket Lelang/ Seleksi	614.202.419	99	Paket Lelang/ Seleksi	644.912.540	99	Paket Lelang/ Seleksi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			4	01	02	06	12		02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	70	Orang	70	Orang	272.115.000	70	Orang	285.720.750			70	Orang	300.006.788	70	Orang	315.007.127	70	Orang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja		30	Orang	30	Orang		30	Orang		30			Orang		30	Orang		30	Orang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja		30	Orang	30	Orang		30	Orang		30			Orang		30	Orang		30	Orang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 06 12 03	Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95 dokumen	96 dokumen	51.480.000	97 dokumen	54.054.000	98 dokumen	56.756.700	99 dokumen	59.594.535	99 dokumen	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	4 01 02 04 01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	100 %	10.627.679.450	100 %	9.533.063.423	100 %	10.629.716.594	100 %	11.048.702.423	100 %	BAGIAN UMUM	
4 01 02 04 01 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan			1.068.000.000		1.121.400.000		1.177.470.000		1.236.343.500				
				Telepon	37 Rek	37 Rek		37 Rek		37 Rek		37 Rek		37 Rek			
				Listrik	12 Rek	12 Rek		12 Rek		12 Rek		12 Rek		12 Rek			
				Air	1 Rek	1 Rek		1 Rek		1 Rek		1 Rek		1 Rek			
				Internet	4 Rek	4 Rek		4 Rek		4 Rek		4 Rek		4 Rek			
4 01 02 04 01 05			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	49 jenis	49 jenis	49.572.100	49 jenis	52.050.705	49 jenis	54.653.240	49 jenis	57.385.902	49 jenis			

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 04 01 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	41 jenis	41 jenis	100.628.200	41 jenis	105.659.610	41 jenis	110.942.591	41 jenis	116.489.720	41 jenis		
			4 01 02 04 01 07	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	29 jenis	29 jenis	99.986.900	29 jenis	104.986.245	29 jenis	110.235.557	29 jenis	115.747.335	29 jenis	BAGIAN UMUM	
			4 01 02 04 01 08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			121.160.000		127.218.000		133.578.900		140.257.845	200 buah		
					Plakat	150 buah	150 buah		150 buah		200 buah		200 buah		200 buah		
					Cinderamata	150 buah	150 buah		150 buah		200 buah		200 buah		200 buah		
					PIN	750 buah	750 buah		750 buah		750 buah		750 buah		750 buah		
			4 01 02 04 01 09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 jenis	40 jenis	80.786.000	40 jenis	84.825.300	40 jenis	89.066.565	40 jenis	93.519.893	40 jenis		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			40102040110	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	49.920.000	2 jenis	52.416.000	2 jenis	55.036.800	2 jenis	57.788.640	2 jenis	BAGIAN UMUM	
			40102040111	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	43 jenis	43 jenis	927.355.000	43 jenis	973.722.750	43 jenis	1.022.408.888	43 jenis	1.073.529.332	43 jenis		
			40102040112	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	190 kali	190 kali	1.267.564.350	190 kali	1.330.942.568	190 kali	1.397.489.696	190 kali	1.467.364.181	190 kali		
			40102040115	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia	48 orang	48 orang	1.297.209.400	48 orang	1.362.069.870	48 orang	1.430.173.364	48 orang	1.501.682.032	48 orang		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	40102040117	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	-	2 unit	660.000.000	1 unit	300.000.000	3 unit	1.100.000.000	2 unit	600.000.000	2 unit	BAGIAN UMUM	
			40102040118	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi	-	2 unit	1.460.000.000	1 unit	300.000.000	3 unit	900.000.000	2 unit	600.000.000	2 unit		
			40102040120	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 jenis	5 jenis	179.566.400	5 jenis	188.544.720	5 jenis	197.971.956	5 jenis	207.870.554	5 jenis		
			40102040121	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 jenis	5 jenis	19.227.800	5 jenis	20.189.190	5 jenis	21.198.650	5 jenis	22.258.582	5 jenis		
			40102040134	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas	3 jenis	3 jenis	900.646.300	3 jenis	945.678.615	3 jenis	992.962.546	3 jenis	1.042.610.673	3 jenis		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			40102040123	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedung	3 gedung	1.403.248.800	3 gedung	1.473.411.240	3 gedung	1.547.081.802	3 gedung	1.624.435.892	3 gedung	BAGIAN UMUM	
			40102040125	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit	709.930.000	17 unit	745.426.500	17 unit	782.697.825	17 unit	821.832.716	17 unit		
			40102040126	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	159.950.000	3 jenis	167.947.500	3 jenis	176.344.875	3 jenis	185.162.119	3 jenis		
			40102040127	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	72.928.200	3 jenis	76.574.610	3 jenis	80.403.341	3 jenis	84.423.508	3 jenis		
			40102040130	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	-	0	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	-	0	-		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			4 01 02 04 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	100 %	214.836.000	100 %	230.750.000	100 %	243.937.500	100 %	258.584.375	100 %	BAGIAN UMUM	
			4 01 02 04 02 04	Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti	5 even	5 even	75.000.000	5 even	78.750.000	5 even	82.687.500	5 even	86.821.875	5 even		
			4 01 02 04 02 05	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD	6 bagian	6 bagian	100.000.000	6 bagian	105.000.000	6 bagian	110.250.000	6 bagian	115.762.500	6 bagian		
			4 01 02 04 02 07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	5 jenis	5 jenis	39.836.000	5 jenis	47.000.000	5 jenis	51.000.000	5 jenis	56.000.000	12 orang		
			3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) penatausahaan keuangan	4 01 02 04 03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	100 %	46.651.400	100 %	48.983.970	100 %	51.433.169	100 %	54.004.827		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			40102040302	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	4 jenis	4 jenis	46.651.400	4 jenis	48.983.970	4 jenis	51.433.169	4 jenis	54.004.827	6 buku		
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) administrasi kerumah tanggaan	401020408	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100 %	100 %	5.000.000.000	100 %	5.250.000.000	100 %	5.512.500.000	100 %	5.788.125.000	100 %	BAGIAN UMUM	
			40102040801	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25 Jenis	25 Jenis	5.000.000.000	25 Jenis	5.250.000.000	25 Jenis	5.512.500.000	25 Jenis	5.788.125.000	25 Jenis		
		401020509	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Prosentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	73 %	75 %	4.847.561.300	78 %	4.685.689.365	80 %	4.837.286.333	80 %	5.079.150.650	80 %	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
													2018		2019		2020		2021				
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		keprotokolan							Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	80 %		80 %		85 %		90 %		95 %		95 %			
			4	01	02	05	09	06	Pendokumenta sian kegiatan pimpinan daerah	jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:			197.000.000		206.850.000	217.192.500	228.052.125		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				
									Foto	2500 lembar	3000 lembar		3000 lembar		3000 lembar		3000 lembar		3000 lembar				
									Video	3 film	3 film		3 film		3 film		3 film		3 film				
									Spanduk	70 buah	70 buah		70 buah		70 buah		70 buah		70 buah				
									Joglo	15 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit				
									Baliho	18 unit	18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit				
									mini Banner	40 buah	40 buah		40 buah		40 buah		40 buah		40 buah				

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					Umbul-umbul	40 buah	40 buah		40 buah		40 buah		40 buah				
			4 01 02 05 09 08	Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah	Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa: Jumpa Pers	2 kali	2 kali	1.948.000.000	2 kali	1.641.150.000	2 kali	1.640.520.000	2 kali	1.722.546.000	2 kali	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
					Media Radio	539 siar	539 siar		539 siar		539 siar		539 siar		539 siar		
					Media Televisi	52 siar	52 siar		52 siar		52 siar		52 siar		52 siar		
					Media Cetak	315 terbit	315 terbit		315 terbit		315 terbit		315 terbit		315 terbit		
					Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun	325 Naskah	330 Naskah		335 Naskah		340 Naskah		345 Naskah		350 Naskah		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			40102050904	Penataan acara kedinasan pemerintah daerah	Jumlah acara kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan	5acara	5acara	2.479.061.300	5acara	2.603.014.365	5acara	2.733.165.083	5acara	2.869.823.337	5acara		
			40102050902	Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antarpemerintah daerah	Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi	30penerimaan	30penerimaan	98.500.000	30penerimaan	103.425.000	30penerimaan	108.596.250	30penerimaan	114.026.063	30penerimaan	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
			40102050901	Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah jenis even daerah yang dapat difasilitasi	1jenis	1jenis	125.000.000	1jenis	131.250.000	1jenis	137.812.500	1jenis	144.703.125	1jenis		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan suatu organisasi, perlu menetapkan indikator kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar dapat dilihat pada **Tabel 7.1.1, Tabel 7.1.2, dan Tabel 7.1.3** sebagai berikut:

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016 – 2017

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)		TARGET 2017	REALISASI 2017
			2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase tempat ibadah aktif	Presentase tempat ibadah aktif	55%	62%	60%	
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1 : 86	1 : 86	1 : 90	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	C	B	B	BB
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARG ET 2018
			2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Presentase tempat ibadah aktif	Presentase tempat ibadah yang terfasilitasi	5%		26%
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Presentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	85%		95%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Presentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	100%	100%	100%
		Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
		Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Setda	B	BB	B
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Presentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	90%	93%	91%
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK

Tabel 7.2
 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 TAHUN 2018 – 2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase tempat ibadah aktif	Presentase tempat ibadah yang terfasilitasi		32%	39%	46%	46%
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Presentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi		100%	100%	100%	100%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Presentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Setda	BB	B	B	B	B
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar (Nilai LPPD)	Presentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	93%	92%	93%	94%	94%
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Perubahan II, disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Blitar wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2016-2021 yang bersifat indikatif serta disusun yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Perubahan II tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar yang selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dokumen Rencana Strategis ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun, menetapkan dan mengkoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian-bagi di lingkungan sekretariat daerah dalam menjabarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Perubahan II Tahun 2016-2021 diperlukan partisipasi dan komitmen seluruh Aparatur Sekretariat Kota Blitar sehingga program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tercapai target yang telah ditentukan serta dapat memberikan jawaban / solusi bagi permasalahan Sekretariat Daerah.

Disamping itu implementasi Rencana Strategis ini juga membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi serta mempunyai kelenturan (fleksibilitas), dinamis dan berdaya guna.

Selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Perubahan II Tahun 2016-2021 ini menjadi acuan kerja bagi bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar yang harus dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kerja.

Kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Renstra merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun dan menetapkan renja perangkat daerah;
2. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan SOTK maka dilakukan perubahan renstra yang berpedoman pada kewenangan terhadap Perwali tentang SOTK.

Demikian 29 (dua puluh sembilan) dokumen Penyempurnaan RENSTRA SKPD mulai dari Dokumen Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sampai dengan Penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 di jadikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,



SANTOSO